



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR **50** TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN  
TERDUGA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : JP.02.03/3/305/2019 tanggal 1 Februari 2019 perihal penggunaan Aplikasi E-Klaim INA-CBG, sistem INA-CBG adalah salah satu metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan yang hanya diperuntukkan bagi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Terduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, untuk tarif pelayanan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah mengacu pada standar tarif INA-CBG sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa mengacu ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur yang

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019, tarif pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur yang tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan tarif Biakes Maskin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Terduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

24. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Miskin Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2015;
28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 35);
30. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 55);

31. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Terduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TERDUGA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Terduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah dan diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 26 a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.



8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Situbondo.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Abdoer Rahem, RSUD Besuki dan RSUD Asembagus.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Biakes Maskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi

masyarakat miskin yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

15. Tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Tarif Biakes Maskin adalah tarif pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
18. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
19. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.



20. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
21. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
22. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
23. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
24. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
25. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

26. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
  - 26a. Bekas Narapidana adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.
  27. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPi adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
  28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 11, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

Sasaran dalam Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. PMKS yang terdiri dari :
  1. anak balita terlantar dengan salah satu atau lebih kriteria :
    - a) terlantar/tanpa asuhan yang layak;
    - b) berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
    - c) kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
    - d) anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;

- e) anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f) anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. anak terlantar dengan salah satu atau lebih kriteria :
    - a) berasal dari keluarga fakir miskin;
    - b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
    - c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  3. anak jalanan dengan salah satu atau lebih kriteria :
    - a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
    - b) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
  4. anak dengan kedisabilitas (ADK) dengan salah satu atau lebih kriteria :
    - a) anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
    - b) anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
    - c) anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
    - d) tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
  5. lanjut usia terlantar dengan salah satu atau lebih kriteria :
    - a) tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
    - b) terlantar secara psikis, dan sosial.
  6. penyandang disabilitas dengan salah satu atau lebih kriteria :
    - a) mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
    - b) mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;

- c) tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
  - d) penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
  - e) penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
  - f) penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
7. Gelandangan dengan kriteria :
- a) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b) tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
  - c) tanpa penghasilan yang tetap; dan
  - d) tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
8. Pengemis dengan kriteria :
- a) mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
  - b) berpakaian kumuh dan compang camping;
  - c) berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
  - d) memperlakui sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
9. Pemulung dengan kriteria :
- a) tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
  - b) mengumpulkan barang bekas.
10. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan kriteria :
- a) seorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
  - b) telah terinfeksi HIV/AIDS.
11. Bekas Narapidana dengan kriteria :
- a) usia 18 tahun sampai dewasa;
  - b) telah selesai atau segera keluar dari penjara;
  - c) kurang diterima/dijauhi/diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
  - d) tidak memiliki pekerjaan tetap.
- b. Penderita terduga KIPI.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan di Puskesmas dan jaringannya, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya yang berlaku.
  - (2) Tarif pelayanan tingkat lanjutan di RSUD mengacu pada standar tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang berlaku.
  - (3) Tarif pelayanan diluar paket Tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur (ambulance dan obat penyakit kronis), mengacu pada tarif Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan.
  - (4) Tarif pelayanan tingkat lanjutan di Rumah Sakit luar Daerah, berdasarkan tarif yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan berdasarkan tarif yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan berkas klaim di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, sebagai berikut :
  - a. kepesertaan :
    1. Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
    2. fotokopi surat rekomendasi kepesertaan.

## b. rujukan :

1. fotokopi rujukan berjenjang sesuai tingkat pelayanan kesehatan (formulir rujukan dari RSUD atau surat rujukan dari puskesmas apabila rumah sakit daerah tidak memiliki kompetensi pelayanan);
2. untuk kasus rawat inap pasien dengan kasus emergency (sesuai kriteria diagnosa emergency), menyertakan surat keterangan rawat dari dokter IGD.

## c. pelayanan pasien :

1. formulir Tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur (harus ada nama dan tanda tangan dokter yang merawat);
2. formulir bukti pelayanan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi);
3. formulir bukti pelayanan pemberian terapi, (Hemodialisa, Fisioterapi, Radioterapi, Kemoterapi dan lain-lain); dan
4. fotokopi resep pemberian obat pasien (untuk kasus klaim obat penyakit kronis yang dibayarkan secara terpisah dari paket Tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur).

## d. jika pasien rawat inap mendapatkan tindakan operasi :

1. fotokopi resume medik pasien;
2. fotokopi resume operasi atau tindakan bedah lainnya; dan
3. fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi).

## e. klaim ambulance :

1. surat tugas;
2. SPPD;
3. fotokopi surat rekomendasi kepesertaan;
4. fotokopi Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
5. surat rujukan/kematian dari dokter yang merawat beserta stempel rumah sakit; dan
6. kuitansi klaim pelayanan ambulance.



5. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan di klaim ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan klaim dan dilampiri biaya perhitungan klaim perawatan rawat jalan, rawat inap, ambulance dan obat penyakit kronis.
- (3) Berita acara persetujuan klaim diluar paket tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur dilampiri dengan perhitungan klaim perawatan rawat jalan dan rawat inap.
- (4) Berita acara persetujuan klaim untuk ambulance dilampiri dengan rekapitulasi biaya ambulance.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen kelengkapannya harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas/ Direktur RSUD.
- (6) Dokumen kelengkapan klaim dibuat dalam rangkap 2 (dua) meliputi :
  - a. kuitansi global;
  - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan;
  - c. klaim rawat jalan;
  - d. klaim rawat inap;
  - e. klaim ambulance;
  - f. klaim obat penyakit kronis; dan
  - g. rekapitulasi klaim.
- (7) Pembiayaan hasil klaim pelayanan yang telah diverifikasi, dibayarkan ke rekening BLUD Puskesmas/RSUD melalui bank yang disetujui oleh Bupati.

- (8) Pembiayaan klaim pelayanan di Rumah Sakit Luar Daerah dibayarkan ke rekening Rumah Sakit tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal **30 DEC 2019**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal **30 DEC 2019**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR **50**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ANNA KUSUMA, S.H..M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009